

BAB 1

PENDAHULUAN

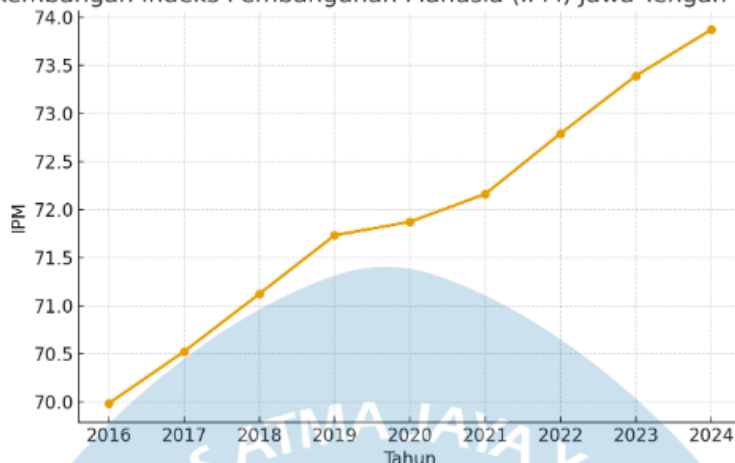
1.1 Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi daerah, di mana konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator utama dari kesejahteraan tersebut. Konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli dan tingkat pendapatan masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Di Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan populasi yang besar di Indonesia, dinamika konsumsi rumah tangga sangat penting untuk dipelajari guna mendukung pembangunan daerah secara optimal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolok ukur utama untuk menilai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Mimika, yang relevan untuk konteks Jawa Tengah sebagai wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang dinamis. Selain itu, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam melakukan konsumsi. Kondisi rumah tangga miskin cenderung membatasi konsumsi pada kebutuhan dasar, khususnya pangan pokok, dan menurunkan konsumsi produk bernutrisi yang lebih baik. Data menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dapat meningkatkan pola konsumsi ke arah makanan yang lebih berkualitas dan variatif (Evita, 2015). Dalam konteks ini, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berpengaruh besar terhadap pola dan besaran konsumsi rumah tangga. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan indikator penting yang merefleksikan kapasitas

ekonomi suatu daerah serta tingkat pendapatan per orang. PDRB perkapita yang meningkat biasanya berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi rumah tangga karena kemampuan daya beli yang juga meningkat. Studi tentang pengaruh PDRB terhadap konsumsi rumah tangga di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara PDRB perkapita dengan konsumsi rumah tangga, yang juga diharapkan terjadi di Jawa Tengah. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama permintaan agregat yang berperan besar dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di tingkat provinsi seperti Jawa Tengah, pola dan tingkat konsumsi rumah tangga tidak hanya mencerminkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi produksi, investasi, dan kebijakan ekonomi daerah. Perubahan faktor-faktor sosio-ekonomi dan kondisi lingkungan dapat mengubah perilaku konsumsi, sehingga penting untuk memahami determinan utama yang memengaruhi pengeluaran rumah tangga dalam rentang waktu tertentu dalam penelitian ini dipilih periode 2016–2024 untuk menangkap dinamika pasca-krisis, perubahan kebijakan, serta kejadian eksternal yang signifikan. Salah satu faktor eksternal yang semakin nyata pengaruhnya adalah bencana alam. Jawa Tengah, dengan kondisi geografis dan iklim yang beragam, rentan terhadap banjir, tanah longsor, gempa, dan angin puting beliung.. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merepresentasikan kualitas hidup melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Peningkatan IPM biasanya berkorelasi dengan kapasitas konsumsi yang lebih tinggi dan perubahan komposisi pengeluaran misalnya permintaan untuk barang dan jasa yang lebih berkualitas. Namun, efek IPM terhadap konsumsi rumah tangga dapat bersifat heterogen: perbaikan pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang sekaligus mengubah preferensi konsumsi, sementara peningkatan standar hidup dapat mendorong konsumsi barang durables dan layanan. Oleh karena itu, memasukkan IPM dalam analisis memberi gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana pembangunan manusia memediasi pola konsumsi.

Tingkat kemiskinan tetap menjadi variabel kunci yang membatasi kemampuan konsumsi rumah tangga. Rumah tangga miskin cenderung memiliki elastisitas konsumsi yang berbeda dan rentan terhadap guncangan ekonomi maupun bencana alam. Kebijakan pengentasan kemiskinan, program perlindungan sosial, dan akses terhadap peluang ekonomi berperan menentukan seberapa efektif perbaikan kondisi ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan konsumsi. Di sisi lain, penurunan kemiskinan yang tidak merata antar wilayah dapat menciptakan disparitas konsumsi yang signifikan di dalam provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan skala dan struktur aktivitas ekonomi regional. Pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan regional yang pada gilirannya mendorong konsumsi. Namun, sumber pertumbuhan (apakah berbasis sektor primer, sekunder, atau tersier) juga mempengaruhi sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat diteruskan ke rumah tangga dalam bentuk lapangan kerja dan pendapatan. Analisis hubungan antara PDRB dan konsumsi rumah tangga di tingkat provinsi penting untuk mengevaluasi keterkaitan antara pertumbuhan makro dan kesejahteraan rumah tangga. Mengingat kompleksitas interaksi antara bencana alam, IPM, kemiskinan, dan PDRB terhadap konsumsi rumah tangga, studi yang fokus pada Jawa Tengah selama periode 2016–2024 diperlukan untuk beberapa alasan. Pertama, rentang waktu tersebut mencakup periode pemulihan pasca-bencana dan perubahan kebijakan pembangunan daerah yang relevan. Kedua, kombinasi variabel sosial, ekonomi, dan lingkungan memungkinkan identifikasi saluran pengaruh yang berbeda misalnya apakah efek bencana bersifat sementara atau memiliki dampak jangka panjang yang berinteraksi dengan tingkat kemiskinan dan IPM. Ketiga, hasil penelitian dapat memberi masukan bagi perumusan kebijakan daerah: mulai dari perencanaan mitigasi bencana, program pengurangan kemiskinan, hingga strategi pembangunan yang mendorong konsumsi berkelanjutan dan inklusif.

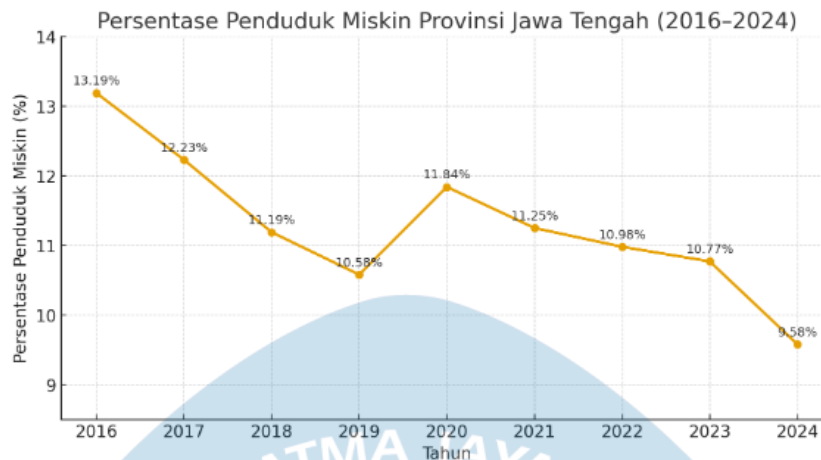
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah 2016-2024



Sumber : Jateng.bps.go.id (2016-2024).

Gambar 1.1 Perkembangan indeks manusia jawa Tengah 2016-2024

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah selama periode 2016 hingga 2024 menunjukkan tren yang terus meningkat meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi maupun sosial. Pada tahun 2016, IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 69,98 yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 70,52 pada tahun 2017 dan 71,12 pada tahun 2018. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan capaian 71,73. Namun, pada tahun 2020, peningkatan IPM melambat dengan angka 71,87, yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup. Kendati demikian, meskipun pandemi menekan perekonomian serta memicu naiknya tingkat kemiskinan di sejumlah wilayah, IPM Jawa Tengah tetap bergerak positif dan tidak mengalami penurunan, melainkan hanya kenaikan yang lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2021, IPM tercatat sebesar 72,16, lalu meningkat lebih pesat menjadi 72,79 pada tahun 2022, 73,39 pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 73,87 pada tahun 2024. Kenaikan berkelanjutan tersebut menegaskan bahwa pembangunan manusia di Jawa Tengah menunjukkan ketahanan yang cukup baik meskipun menghadapi kondisi eksternal yang menantang, baik akibat bencana alam maupun krisis global seperti pandemi.



Sumber : Jateng.bps.go.id (2016-2024).

Gambar 1.2 Persentase penduduk miskin provinsi Jawa Tengah 2016-2024

Tercatat angka kemiskinan relatif tinggi, yakni sekitar 13,19 persen pada September 2016, yang mencerminkan tantangan struktural dalam aspek pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar di sejumlah wilayah provinsi. Penurunan bertahap yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya misalnya menurun menjadi sekitar 12,23 persen pada 2017 dan terus turun ke kisaran 11–10 persen pada 2018–2019 menunjukkan adanya perbaikan yang terakumulasi akibat kombinasi faktor: kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terfokus, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah, serta perbaikan akses pendidikan dan layanan dasar yang memberi dampak terhadap kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi dasar. Penurunan yang konsisten hingga 2019 (sekitar 10,58 persen) mencerminkan momentum perbaikan sosial-ekonomi yang sudah berlangsung sebelum masuknya guncangan global berikutnya. periode pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menandai titik balik sementara dalam tren tersebut. Data BPS menunjukkan adanya kenaikan persentase kemiskinan pada 2020 (sekitar 11,84 persen pada September 2020), yang erat kaitannya dengan kontraksi aktivitas ekonomi, gangguan mata pencaharian sektor informal, penurunan upah dan pendapatan, serta meningkatnya kerentanan rumah tangga terhadap guncangan kesehatan dan ekonomi. Kenaikan

kemiskinan pada masa pandemi menggambarkan karakter krisis yang bersifat multidimensi: bukan sekadar penurunan pendapatan, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya konsumsi barang non-pokok, meningkatnya tekanan terhadap pengeluaran untuk kesehatan, dan terganggunya akses pendidikan yang pada jangka menengah akan memengaruhi potensi pendapatan rumah tangga. Fenomena ini menegaskan perlunya kebijakan perlindungan sosial yang cepat, tepat sasaran, dan bersifat temporer selama fase darurat, sekaligus penguatan program-program pemulihan yang mampu menjangkau kelompok paling rentan.

Setelah fase awal pandemi, data menunjukkan pemulihan yang berangsur persentase kemiskinan kembali menurun pada periode pasca-2020, mencapai level sekitar 11,25 persen pada 2021 dan berada di kisaran 10,98 persen pada September 2022. Penurunan ini dapat ditafsirkan sebagai hasil kombinasi pembukaan kembali aktivitas ekonomi, program stimulus serta jaring pengaman sosial yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah, peningkatan permintaan domestik, serta upaya pemulihan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menyerap tenaga kerja. Perbaikan kondisi ini memungkinkan sebagian rumah tangga untuk memulihkan pendapatan dan kembali meningkatkan tingkat konsumsi, sekaligus menurunkan ketergantungan pada bantuan darurat.

Memasuki tahun 2023–2024, tren penurunan kemiskinan semakin nyata, dengan angka persentase yang menurun ke tingkat yang lebih rendah pada September 2024 (sekitar 9,58 persen). Penurunan ke satu digit ini merupakan capaian penting yang menunjukkan keberhasilan kumulatif berbagai intervensi pembangunan dan pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Kenaikan investasi infrastruktur, perbaikan akses layanan pendidikan dan kesehatan, program-program pemberdayaan ekonomi lokal, serta stabilisasi harga pangan dan penyaluran bantuan sosial yang lebih baik menjadi faktor pendorong utama dalam mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain itu, pemulihan lapangan kerja di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja besar

termasuk industri pengolahan, perdagangan, dan jasa membantu menambah pendapatan rumah tangga sehingga mengurangi proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kinerja penurunan kemiskinan pada 2024 juga mengindikasikan adanya pengaruh positif dari perbaikan indikator makro yang lebih luas seperti pertumbuhan ekonomi regional dan stabilitas inflasi, yang pada akhirnya memberi ruang bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Pertama, angka persentase kemiskinan secara agregat menyamarkan ketimpangan antar-wilayah dalam provinsi; beberapa kabupaten/kota masih mencatat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi sehingga penurunan rata-rata provinsi belum tentu mencerminkan perbaikan merata. Kedua, aspek struktural seperti kualitas pendidikan, keterampilan kerja, akses pembiayaan bagi UMKM, dan ketahanan terhadap bencana alam harus terus menjadi fokus agar penurunan kemiskinan bersifat berkelanjutan. Jawa Tengah yang memiliki eksposur tinggi terhadap bencana alam perlu mengintegrasikan strategi mitigasi risiko bencana dengan program pengurangan kemiskinan, karena guncangan alam dapat dengan cepat mengikis aset dan pendapatan rumah tangga miskin. Ketiga, meskipun persentase kemiskinan menurun, indikator lain seperti kedalaman kemiskinan (gap) dan keparahan kemiskinan (severity) perlu dianalisis untuk memastikan bahwa perbaikan bersifat substantif dan tidak hanya marginal.

Perubahan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah periode 2016–2023 menjadi dasar penting dalam melihat pola konsumsi rumah tangga. Penurunan kemiskinan pada periode menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, meskipun fluktuasi pada masa pandemi memperlihatkan bahwa guncangan besar dapat menekan konsumsi dalam jangka pendek. Dengan mengaitkan kemiskinan bersama variabel lain seperti IPM dan PDRB ADHB, penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh PDRB terhadap perubahan pola konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah?
2. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap perubahan konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah?
3. Bagaimana Pengaruh kemiskinan terhadap perubahan konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan penelitian

1. Menganalisis Pengaruh PDRB terhadap perubahan konsumsi rumah tangga petani di Jawa Tengah.
2. Menganalisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap perubahan konsumsi rumah tangga petani di Jawa Tengah
3. Menganalisis Pengaruh kemiskinan terhadap perubahan konsumsi rumah tangga petani di Jawa Tengah

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis:** Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu serta menambah referensi dalam kajian akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga petani di Jawa Tengah.
2. **Manfaat Praktis:** Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan membantu organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dalam merancang program yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga petani.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan pada dasar pemikiran teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga PDRB berdampak positif dan signifikan terhadap perubahan pola konsumsi rumah tangga petani di Jawa Tengah.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berdampak positif dan signifikan terhadap perubahan pola konsumsi rumah tangga petani di Jawa Tengah
3. Diduga Kemiskinan berdampak negatif dan signifikan terhadap perubahan pola konsumsi rumah tangga petani di Jawa Tengah

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 dalam penelitian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini menguraikan teori-teori dan bukti empiris yang sudah ada berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berkaitan dengan data serta alat dan tahapan analisis. Isi dalam bab ini berupa lokasi dan periode penelitian, data yang digunakan beserta sumbernya, spesifikasi model, tahapan analisis data, serta batasan operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan secara rinci hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan alat uji yang ada pada sebelumnya, dan interpretasi pembahasan sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang menyatakan hasil penelitian. Selain itu, ada pula saran yang relevan ditujukan kepada penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan.